



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
 - b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renja PD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.


Pasal 3


- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

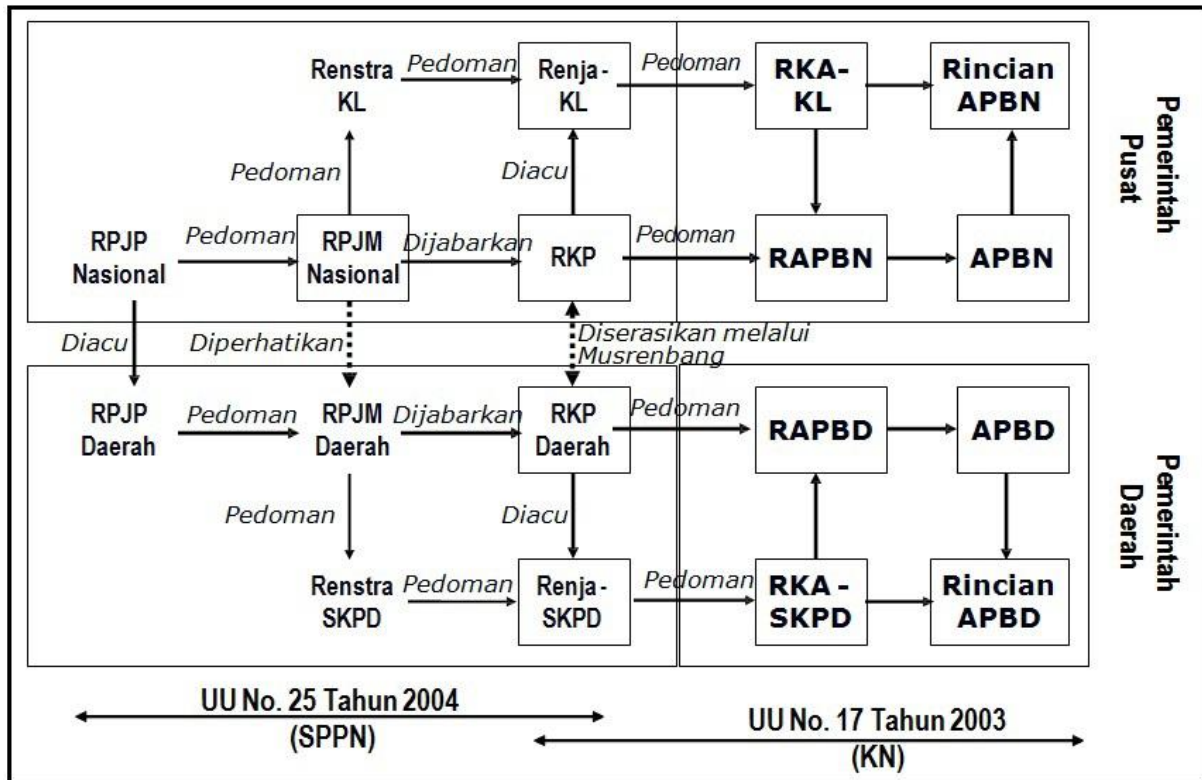
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2026 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan berpedoman hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49); dan
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 32).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024,
2. Evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | | | Target Kinerja Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (7/6) | (9) | (10) = (5+7+9) atau (10) = (9)* | (11) = (10/4) |
| | Urusan Pengawasan | | | | | | | | | |
| 4.01.04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas | 55.56 Persen | 38,89 Persen | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.04.5.06 | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti | 100 Persen | 74 Persen | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.04.5.06.0002 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY | 30 Laporan | 14 Laporan | - | - | - | - | 14 Laporan | 46,67 Persen |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 86.08 Nilai | 83 Nilai | 83,70 Nilai | 100.00 % | 83 Nilai | 83 Nilai | 100.00% |
| 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 100.00% | 95 Persen | 95 Persen | 100.00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | | | Target Kinerja Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (7/6) | (9) | (10) = (5+7+9) atau (10) = (9)* | (11) = (10/4) |
| 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 8 Dokumen | 133.33% | 6 Dokumen | 20 Dokumen | 333.33% |
| 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100.00% | 7 Dokumen | 19 Dokumen | 316.67% |
| 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100.00% | 100 Persen | 100 Persen | 100.00% |
| 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 53 Orang/bulan | 56 Orang/bulan | 56 Orang/bulan | 52 Orang/bulan | 92.86% | 54 Orang/bulan | 162 Orang/bulan | 305.66% |
| 6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.00% | 12 Dokumen | 36 Dokumen | 300.00% |
| 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 22 Laporan | 22 Laporan | 22 Laporan | 24 Laporan | 109.09% | 22 Laporan | 68 Laporan | 309.09% |
| 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 100.00% | 95 Persen | 95 Persen | 100.00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | | | Target Kinerja Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (7/6) | (9) | (10) = (5+7+9) atau (10) = (9)* | (11) = (10/4) |
| 6.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.00% | 2 Dokumen | 6 Dokumen | 300.00% |
| 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 34 Orang | 30 Orang | 32 Orang | 33 Orang | 103.13% | 34 Orang | 97 Orang | 285.29% |
| 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 100.00% | 95 Persen | 95 Persen | 100.00% |
| 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 11 Paket | 8 Paket | 9 Paket | 9 Paket | 100.00% | 4 Paket | 21 Paket | 190.90% |
| 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 23 Paket | 26 Paket | 21 Paket | 21 Paket | 100.00% | 22 Paket | 69 Paket | 300.00% |
| 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 27 Paket | 29 Paket | 25 Paket | 25 Paket | 100.00% | 23 Paket | 77 Paket | 285.18% |
| 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 9 Paket | 10 Paket | 8 Paket | 8 Paket | 100.00% | 11 Paket | 29 Paket | 322.22% |
| 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100.00% | 6 Dokumen | 18 Dokumen | 300.00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | | | Target Kinerja Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (7/6) | (9) | (10) = (5+7+9) atau (10) = (9)* | (11) = (10/4) |
| 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24 Laporan | 25 Laporan | 22 Laporan | 30 Laporan | 136.36% | 22 Laporan | 77 Laporan | 320.83% |
| 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 190 Laporan | 165 Laporan | 170 Laporan | 185 Laporan | 108.82% | 150 Laporan | 500 Laporan | 263.15% |
| 6.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2500 Dokumen | 2500 Dokumen | 2500 Dokumen | 2500 Dokumen | 100.00% | 2500 Dokumen | 7500 Dokumen | 300.00% |
| 6.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.00% | 12 Dokumen | 36 Dokumen | 300.00% |
| 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 100.00% | 95 Persen | 95 Persen | 100.00% |
| 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.00% | 12 Laporan | 36 Laporan | 300.00% |
| 6.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 100.00% | 4 Laporan | 12 Laporan | 300.00% |
| 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 24 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 100.00% | 24 Laporan | 72 Laporan | 300.00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | | | Target Kinerja Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (7/6) | (9) | (10) = (5+7+9) atau (10) = (9)* | (11) = (10/4) |
| | | Kantor yang Disediakan | | | | | | | | |
| 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 100.00% | 95 Persen | 95 Persen | 100.00% |
| 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 Unit | 23 Unit | 23 Unit | 23 Unit | 100.00% | 23 Unit | 69 Unit | 300.00% |
| 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100.00% | 1 Unit | 3 Unit | 300.00% |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku | 16 Persen | 13 Persen | 14 Persen | 14 Persen | 100.00% | 15 Persen | 15 Persen | 93.75% |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100.00% | 100 Persen | 100 Persen | 100.00% |
| 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 16 Laporan | 16 Laporan | 16 Laporan | 16 Laporan | 100.00% | 16 Laporan | 48 Laporan | 300.00% |
| 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan | 89 Laporan | 89 Laporan | 89 Laporan | 89 Laporan | 100.00% | 89 Laporan | 267 Laporan | 300.00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | | | Target Kinerja Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (7/6) | (9) | (10) = (5+7+9) atau (10) = (9)* | (11) = (10/4) |
| | | Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 204 Laporan | 204 Laporan | 204 Laporan | 208 Laporan | 101.96% | 204 Laporan | 616 Laporan | 301.96% |
| 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 100 Laporan | 100 Laporan | 100 Laporan | 100 Laporan | 100.00% | 100 Laporan | 300 Laporan | 300.00% |
| 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 42 Laporan | 42 Laporan | 42 Laporan | 42 Laporan | 100.00% | 42 Laporan | 126 Laporan | 300.00% |
| 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 1 Kesepakatan | 1 Kesepakatan | 1 Kesepakatan | 6 Kesepakatan | 600.00% | 1 Kesepakatan | 8 Kesepakatan | 800.00% |
| 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100.00% | 4 Dokumen | 12 Dokumen | 300.00% |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100.00% | 100 Persen | 100 Persen | 100.00% |
| 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.00% | 1 Laporan | 3 Laporan | 300.00% |
| 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 10 Laporan | 25 Laporan | 10 Laporan | 10 Laporan | 100.00% | 10 Laporan | 45 Laporan | 450.00% |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, | Persentase Perangkat Daerah | 40 Persen | 25 Persen | 20 Persen | 20 Persen | 100.00% | 35 Persen | 35 Persen | 87.50% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | | | Target Kinerja Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (7/6) | (9) | (10) = (5+7+9) atau (10) = (9)* | (11) = (10/4) |
| | PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | yang Menerapkan Manajemen Risiko | | | | | | | | |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan | 90 Porsen | 75 Porsen | 80 Porsen | 80 Porsen | 100.00% | 85 Porsen | 85 Porsen | 94.44% |
| 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 6 Rekomendasi | 6 Rekomendasi | 6 Rekomendasi | 6 Rekomendasi | 100.00% | 6 Rekomendasi | 18 Rekomendasi | 300.00% |
| 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 2 Rekomendasi | 2 Rekomendasi | 2 Rekomendasi | 2 Rekomendasi | 100.00% | 2 Rekomendasi | 6 Rekomendasi | 300.00% |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase laporan pendampingan dan asistensi | 100 Porsen | 100 Porsen | 100 Porsen | 100 Porsen | 100.00% | 100 Porsen | 100 Porsen | 100.00% |
| 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 14 Perangkat Daerah | 14 Perangkat Daerah | 14 Perangkat Daerah | 14 Perangkat Daerah | 100.00% | 14 Perangkat Daerah | 42 Perangkat Daerah | 300.00% |
| 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 29 Perangkat Daerah | 29 Perangkat Daerah | 29 Perangkat Daerah | 29 Perangkat Daerah | 100.00% | 29 Perangkat Daerah | 87 Perangkat Daerah | 300.00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | | | Target Kinerja Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (7/6) | (9) | (10) = (5+7+9) atau (10) = (9)* | (11) = (10/4) |
| 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 36 Kegiatan | 96 Kegiatan | 36 Kegiatan | 36 Kegiatan | 100.00% | 100 Kegiatan | 232 Kegiatan | 644.44% |
| 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 16 Perangkat Daerah | 16 Perangkat Daerah | 16 Perangkat Daerah | 16 Perangkat Daerah | 100.00% | 16 Perangkat Daerah | 48 Perangkat Daerah | 300.00% |

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Indikator Program tercapai |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator Kegiatan tercapai |
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terdapat mutasi dan pensiun pegawai/ASN |

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Perangkat Daerah pelaksana urusan keistimewaan sudah berkualitas |
| | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan telah ditindaklanjuti |
| 1 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan | Tim APIP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan secara berkala |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, koordinasi, dan kerjasama yang baik antar bidang untuk pelaksanaan program kegiatan |
| 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Ketepatan waktu dalam memperoleh data pendukung dokumen perencanaan perangkat daerah |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Ketepatan waktu dalam memperoleh data pendukung dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang baik |
| 4 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan` |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dan asset sesuai dengan jadwal |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang masif dan berkelanjutan |
| 6 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kinerja tim penilai berjalan dengan baik |
| 7 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Peningkatan kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang masif dan berkelanjutan |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kinerja Pengelola Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perkiraan kebutuhan |
| 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perkiraan kebutuhan |
| 10 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perkiraan kebutuhan |
| 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perkiraan kebutuhan |
| 12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perkiraan kebutuhan |
| 13 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perkiraan kebutuhan |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perkiraan kebutuhan |
| 15 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perkiraan kebutuhan |
| 16 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perkiraan kebutuhan |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik |
| 17 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perkiraan kebutuhan |
| 18 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perkiraan kebutuhan |
| 19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen dalam pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas dan tahapan |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik |
| 20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perkiraan kebutuhan |
| 21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Adanya peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku |
| | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Adanya peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku |
| 22 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Pelaksanaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan adanya kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang |
| 23 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pelaksanaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan adanya kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang |
| 24 | Reviu Laporan Kinerja | Pelaksanaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Tahunan (PKPT) dan adanya kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang |
| 25 | Reviu Laporan Keuangan | Pelaksanaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan adanya kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang |
| 26 | Pengawasan Desa | Pelaksanaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan adanya kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang |
| 27 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang |
| 28 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang |
| | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Pengaduan dan/atau Permohonan telah Ditindaklanjuti |
| 29 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Tidak adanya permohonan/ aduan dari pihak lain (Masyarakat, Kepala Daerah, APH, K/L/D/I) |
| 30 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang |
| | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Perangkat Daerah telah Menerapkan Manajemen Risiko |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan |
| 31 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Adanya regulasi dari pusat terkait pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah serta adanya Kerjasama yang baik antar bidang |
| 32 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Adanya regulasi dari pusat terkait kebijakan teknis serta adanya Kerjasama yang baik antar bidang |
| | Pendampingan dan Asistensi | Kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang |
| 33 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan adanya kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang |
| 34 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pelaksanaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan adanya |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang |
| 35 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan` serta adanya kerja sama yang baik antara APH dan Forpi |
| 36 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Pelaksanaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan adanya kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen auditi terhadap percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten;
2. Melakukan kegiatan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan seluruh auditi terkait temuan secara berkala;
3. Menyusun perencanaan pengawasan yang telah diintegrasikan dengan profil risiko organisasi secara keseluruhan;
4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia secara masif dan berkelanjutan; dan
5. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan, untuk memastikan adanya penugasan tambahan akibat dari perubahan lingkungan strategis maupun resiko yang baru teridentifikasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan

hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan | Realisasi | | | Target | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------|--------|-------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Indikator Tujuan | | | | | | |
| | Nilai Capaian Area Penguatan APIP | Nilai | 92 | 88 | 90,23 | 90,25 | 90,30 |
| 2. | Indikator Sasaran | | | | | | |
| | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Nilai | 3,05 | 3,06 | 3,12 | 3,13 | 3,16 |
| | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY, dan Inspektorat Kabupaten | Persen | 93,3 | 92,1 | 93,79 | 93,84 | 94,19 |

Sesuai pencapaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU yang tidak memenuhi target adalah: *Nihil*
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: *Nihil*
2. IKU yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Kapabilitas APIP; dan
 - b. Presentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten.

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

 - a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh APIP;

- b. Perencanaan, koordinasi, dan kerjasama yang baik antar bidang untuk pelaksanaan program kegiatan pengawasan;
- c. Kerjasama yang baik antar stakeholder dan mitra bidang pengawasan;
- d. Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia secara masif dan berkelanjutan; dan
- e. Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2026 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen auditi terhadap percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten;
2. Melakukan kegiatan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan seluruh auditi terkait temuan secara berkala;
3. Menyusun perencanaan pengawasan yang telah diintegrasikan dengan profil risiko organisasi secara keseluruhan;
4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia secara masif dan berkelanjutan;
5. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan, untuk memastikan adanya penugasan tambahan akibat dari perubahan lingkungan strategis maupun resiko yang baru teridentifikasi; dan
6. Melakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) terhadap elemen-elemen kapabilitas APIP guna mengetahui elemen yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement*) sebagai dasar untuk menyusun *Action Plan* menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

| Kekuatan | Kelemahan |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing- masing fungsi | Rencana pelatihan/pengembangan diklat belum didasarkan pada analisis <i>gap</i> kebutuhan pengawasan dan sertifikasi professional penunjang pengawasan |
| Adanya forum komunikasi/ koordinasi pengawasan | Kondisi sarpras dan gedung kantor yang kurang memadai sehingga belum mendukung kinerja secara optimal |
| Perkembangan teknologi/ sistem Informasi | Terbatasnya kompetensi dan kuantitas SDM APIP |
| Adanya regulasi terkait pembinaan dan pengawasan dari K/L/D/I setiap tahunnya | Beban tugas yang sangat tinggi terutama yang bersifat mandatori dan wajib dilaksanakan oleh APIP |

Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

| Peluang | Tantangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kegiatan pendampingan | Sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan |
| Kemitraan dengan BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul | Tuntutan penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai <i>consulting partner</i> dan Asistensi Pendampingan |
| Adanya amanat Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi | Perubahan peraturan perundangan bidang pengawasan |

| Peluang | Tantangan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RI, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nomor : 11 Tahun 2024; Nomor : 700.1/3013/SJ; Nomor : HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah | yang harus disikapi secara cepat dan tepat |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun 2026 yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan monitoring evaluasi;
2. Mengoptimalkan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisis gap kebutuhan pengawasan dan sertifikasi professional penunjang pengawasan;
4. Melaksanakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
5. Mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan
6. Mengoptimalkan sistem deteksi dini (*early warning*) dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi baik untuk deteksi *fraud*, maupun penyimpangan lainnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 | | | | | catatan penting |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Kab. Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Nilai 83 | 14.297.072.035 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) IKM | Nilai 84,16 Indeks 94,81 | 12,224,668,585 | |
| 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 95 Persen | 6.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 Persen | 11,750,000 | |
| 6.01.01.2.01.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 4.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 7,500,000 | |
| 6.01.01.2.01.007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | 2.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | 4,250,000 | |
| 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 100 Persen | 9.121.984.178 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 100 Persen | 10,388,101,558 | |
| 6.01.01.2.02.001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | 53 Orang/bulan | 8.980.484.178 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | 60 Orang/bulan | 10,275,491,558 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 | | | | | catatan penting |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Tunjangan ASN | | | | Semua Kel/Desa | Tunjangan ASN | | | |
| 6.01.01 .2.02.0 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 140.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 108,360,000 | |
| 6.01.01 .2.02.0 007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 Laporan | 1.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 15 Laporan | 4,250,000 | |
| 6.01.0 1.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 95 Persen | 983.550.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen | 471,262,500 | |
| 6.01.01 .2.05.0 005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 2.000.000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 2,422,500 | |
| 6.01.01 .2.05.0 009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Bantul | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 34 Orang | 981.550.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 41 Orang | 468,840,000 | |
| 6.01.0 1.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi | 95 Persen | 2.529.717.857 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi | 100 Persen | 749,480,037 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 | | | | | catatan penting |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Umum Perangkat Daerah | | | | Semua Kel/Desa | Umum Perangkat Daerah | | | |
| 6.01.01 .2.06.0 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 11 Paket | 11.760.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 3,335,680 | |
| 6.01.01 .2.06.0 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 23 Paket | 565.660.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 23 Paket | 255,134,164 | |
| 6.01.01 .2.06.0 003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 27 Paket | 201.720.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 27 Paket | 45,825,940 | |
| 6.01.01 .2.06.0 005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 9 jenis | 41.847.857 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 9 paket | 47,881,857 | |
| 6.01.01 .2.06.0 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6 Dokumen | 9.200.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 7,500,000 | |
| 6.01.01 .2.06.0 008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24 Laporan | 29.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24 Laporan | 29,000,000 | |
| 6.01.01 .2.06.0 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat | 190 Laporan | 1.559.790.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat | 150 Laporan | 311,091,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 | | | | | catatan penting |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | Semua Kel/Desa | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| 6.01.01 .2.06.0 010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2500 Dokumen | 40.740.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2500 Dokumen | 37,711,396 | |
| 6.01.01 .2.06.0 011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | 70.000.000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | 12,000,000 | |
| 6.01.0 1.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | 585.220.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 263,032,860 | |
| 6.01.01 .2.08.0 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 16.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 4,205,808 | |
| 6.01.01 .2.08.0 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 42.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 50,890,000 | |
| 6.01.01 .2.08.0 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | 24 Laporan | 527.220.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | 24 Laporan | 207,937,052 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 | | | | | catatan penting |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Umum Kantor yang Disediakan | | | | Semua Kel/Desa | Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| 6.01.0 1.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | 1.070.600.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 341,041,630 | |
| 6.01.01 .2.09.0 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 Unit | 831.555.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 Unit | 237,137,250 | |
| 6.01.01 .2.09.0 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 239.045.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 103,904,380 | |
| 6.01.0 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Kab. Bantul | Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | 16 Persen | 1.003.533.390 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Persentase penurunan temuan berulang | 38 Persen | 146,175,000 | |
| 6.01.0 2.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kab. Bantul | Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 Persen | 940.753.390 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 Persen | 135,650,000 | |
| 6.01.02 .2.01.0 001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 16 Laporan | 208.773.390 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 150 Laporan | 26,475,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 | | | | | catatan penting |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Semua Kel/Desa | | | | |
| 6.01.02 .2.01.0 002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 89 Laporan | 211.800.000 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 130 Laporan | 11,050,000 | |
| 6.01.02 .2.01.0 003 | Reviu Laporan Kinerja | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 204 Laporan | 163.750.000 | Reviu Laporan Kinerja | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 15 Laporan | 18,900,000 | |
| 6.01.02 .2.01.0 004 | Reviu Laporan Keuangan | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 100 Laporan | 160.760.000 | Reviu Laporan Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 95 Laporan | 12,750,000 | |
| 6.01.02 .2.01.0 005 | Pengawasan Desa | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 42 Laporan | 69.240.000 | Pengawasan Desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 30 Laporan | 10,650,000 | |
| 6.01.02 .2.01.0 006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Kab. Bantul | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 1 Kesepakatan | 66.240.000 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 1 Kesepakatan | 7,225,000 | |
| 6.01.02 .2.01.0 007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 Dokumen | 60.190.000 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 Dokumen | 48,600,000 | |
| 6.01.0 2.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Kab. Bantul | Persentase Pengaduan dan/atau | 100 Persen | 62.780.000 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, | Persentase Pengaduan dan/atau | 100 Persen | 10,525,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 | | | | | catatan penting |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Permohonan yang Ditindaklanjuti | | | | Semua Kel/Desa | Permohonan yang Ditindaklanjuti | | | |
| 6.01.02.2.02.001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 1 Laporan | 28.330.000 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 2 Laporan | 3,000,000 | |
| 6.01.02.2.02.002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 10 Laporan | 34.450.000 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 19 Laporan | 7,525,000 | |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Kab. Bantul | Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Resiko | 40 Persen | 2.701.817.752 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi | 3,024 nilai | 1,004,909,500 | |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Kab. Bantul | Presentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 90 Persen | 347.507.752 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Presentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 90 Persen | 12,900,000 | |
| 6.01.03.2.01.001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Kab. Bantul | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 6 Rekomendasi | 201.000.000 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 6 Rekomendasi | 6,900,000 | |
| 6.01.03.2.01.002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Kab. Bantul | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi | 2 Rekomendasi | 146.507.752 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi | 2 Rekomendasi | 6,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 | | | | | catatan penting |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Pengawasan yang Disusun | | | | | Pengawasan yang Disusun | | | |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Kab. Bantul | Presentase Laporan Pendampingan dan Asistensi | 100 Persen | 2.354.310.000 | Pendampingan dan Asistensi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Presentase Laporan Pendampingan dan Asistensi | 100 Persen | 992,009,500 | |
| 6.01.03.2.02.001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 14 Perangkat Daerah | 191.560.000 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 47 Perangkat Daerah | 8,500,000 | |
| 6.01.03.2.02.002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 29 Perangkat Daerah | 167.420.000 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 17 Perangkat Daerah | 9,100,000 | |
| 6.01.03.2.02.003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kab. Bantul | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 36 Kegiatan | 1.732.970.000 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 25 Kegiatan | 939,208,000 | |
| 6.01.03.2.02.004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 16 Perangkat Daerah | 262.360.000 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 47 Perangkat Daerah | 35,201,500 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2026 serta tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku
Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|----|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | | | | | |

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif" dengan Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins* sebagai berikut:

Tabel 3.1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. | 1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. |
| 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. | 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. |
| 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. | 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. |
| 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. | 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. |
| 5. Pemberantasan kemiskinan. | |
| 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. | |
| 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. | |
| 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. | |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.</p> <p>10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.</p> <p>11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.</p> <p>13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.</p> <p>14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.</p> <p>15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja</p> | <p>5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.</p> <p>6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.</p> <p>7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</p> <p>8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.</p> |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.</p> <p>16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.</p> <p>17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.</p> | |

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2026 tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah melalui penerapan *mandatory spending* dan sistem pengawasan berbasis risiko serta pemenuhan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM APIP;
2. Meningkatkan kapabilitas APIP untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan dan fraud;
3. Mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif di seluruh OPD;
4. Meningkatkan peran dan layanan APIP, mencakup audit ketaatan, audit kinerja, jasa konsultasi, serta assurance tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi;
5. Mengedepankan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan selesai berdasarkan orientasi pencegahan (*early warning system*); dan
6. Menjalinkan kerja sama dengan BPKP, KPK, APIP lain dan APH dalam pelaksanaan pengawasan lintas sektor dan memanfaatkan forum koordinasi pengawasan untuk harmonisasi kebijakan pusat-daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan" dengan Prioritas Daerah (PD) sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan | Baseline | | Target Tahun 2026 |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Realisasi 2024 | Target 2025 | |
| 1. | Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan | | Nilai Capaian Area Penguatan APIP | Nilai | 90,23 | 90,25 | 90,30 |
| 2. | | Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Nilai | 3,12 | 3,13 | 3,16 |
| | | | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY, dan Inspektorat Kabupaten | Persen | 93,79 | 93,84 | 94,19 |

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Bantul

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | Inspektorat Daerah | | | | | | 13.375.753.085,00 | | | | | | | 12.892.653.240,00 | |
| | 6 | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 13.375.753.085,00 | | | | | | | 12.892.653.240,00 | |
| | 6 | 0 | | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | 13.375.753.085,00 | | | | | | | 12.892.653.240,00 | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) IKM | - | | | 84,16 Angka 94,81 Indeks | 12.224.668.585,00 | | | | | | - | 11.743.129.721,00 | |
| | 6 | 0 | 0 | 2. | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaa n dan Evaluasi Perangkat Daerah | - | | | 100 Persen | 11.750.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | - | 12.750.000,00 | |
| | 6 | 0 | 0 | 2. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 01 | | | | | | 8 Dokumen | 7.500.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 8.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 0 | 0 | 2. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 01 | | | | | | 7 Laporan | 4.250.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 4.750.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 0 1 1 2. 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Keuangan | - | | | 100 Persen | 10.388.101.558,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | - | 9.983.335.001,00 | |
| | 6 0 1 1 2. 02 00 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 60 Orang/b ulan | 10.275.491.558,00 | Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 9.866.885.001,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 1 1 2. 02 00 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 108.360.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 110.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 1 1 2. 02 00 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semester an SKPD | | | | 15 Laporan | 4.250.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 6.450.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 0 1 1 2. 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaa n Kepegawai an | - | | | 100 Persen | 471.262.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | - | 243.680.000,00 | |
| | 6 0 1 1 2. 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 2 Dokumen | 2.422.500,00 | Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 9.850.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 1 1 2. 05 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 41 Orang | 468.840.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 233.830.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 1 1 2. 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum | - | | | 100 Persen | 749.480.037,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | - | 996.874.563,00 | |
| | 6 0 1 1 2. 06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 3.335.680,00 | Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 2.451.528,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 1 1 2. 06 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 23 Paket | 255.134.164,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 300.210.053,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 0 2. 00 1 1 06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 27 Paket | 45.825.940,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 249.913.758,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 0 2. 00 1 1 06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 9 Paket | 47.881.857,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 42.745.750,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 0 2. 00 1 1 06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 7.500.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 7.700.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 0 2. 00 1 1 06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 24 Laporan | 29.000.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 30.950.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 0 1 1 2. 06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 150 Laporan | 311.091.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 326.500.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 1 1 2. 06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2500 Dokumen | 37.711.396,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 32.078.474,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 1 1 2. 06 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 4.325.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 1 1 2. 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 Persen | 263.032.860,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | - | 261.675.000,00 | |
| | 6 0 1 1 2. 08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 4.205.808,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 4.300.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 0 1 1 2. 08 00 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 50.890.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 47.375.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 1 1 2. 08 00 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 24 Laporan | 207.937.052,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 210.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 1 1 2. 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | - | | | 100 Persen | 341.041.630,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | - | 244.815.157,00 | |
| | 6 0 1 1 2. 09 00 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 23 Unit | 237.137.250,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Inspektorat | | 218.318.620,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 1 1 2. 09 00 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 103.904.380,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Inspektorat | | 26.496.537,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|---|---|----|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | yang berkualitas dan berkeadilan | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase penurunan temuan berulang | - | | | 38 Persen | 146.175.000,00 | | | | | | - | 129.695.747,00 | |
| | 6 | 0 | 0 | 2. | 01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase penyelenggaraan pengawasan internal | - | | | 100 Persen | 135.650.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | - | 119.550.000,00 | |
| | 6 | 0 | 0 | 2. | 00 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 150 Laporan | 26.475.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 22.550.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 0 | 0 | 2. | 00 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 130 Laporan | 11.050.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 6.550.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 0 | 0 | 2. | 00 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | | | | 15 Laporan | 18.900.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 22.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 0 | 0 | 2. | 00 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|------|---|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | | | | 95 Laporan | 12.750.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 11.900.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 0 | 0 | 2. | 00 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Desa | | | | 30 Laporan | 10.650.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 9.050.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 0 | 0 | 2. | 00 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kesepakata n Pengawasa n Internal yang Terbentuk | | | | 1 Kesepaka tan | 7.225.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 6.900.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 | 0 | 0 | 2. | 00 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n APIP | | | | 4 Dokumen | 48.600.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 40.600.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 0 1 2 2. | 0 0 2 02 | | | | | 100 Persen | 10.525.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | - | 10.145.747,00 | |
| | 6 0 1 2 2. | 0 0 2 02 | | 00 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | | | | 2 Laporan | 3.000.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 2.875.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 1 2 2. | 0 0 2 02 | | 00 02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | 19 Laporan | 7.525.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 7.270.747,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 3 | 6 0 1 3 | 0 0 3 | | | | | 3,024 Nilai | 1.004.909.500,00 | | | | | | - | 1.019.827.772,00 | |
| | 6 0 1 3 2. | 0 0 3 01 | | | | | 90 Persen | 12.900.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | - | 12.850.000,00 | |
| | 6 0 1 3 2. | 0 0 3 01 | | 00 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | | | | 6 Rekomendasi | 6.900.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 7.050.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6002.00 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | | | | 2 Rekomendasi | 6.000.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 5.800.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6002.00 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase laporan pendampingan dan asistensi | - | | | 100 Persen | 992.009.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | - | 1.006.977.772,00 | |
| | 6002.00 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 47 perangkat daerah | 8.500.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 8.800.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6002.00 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | 17 perangkat daerah | 9.100.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 8.700.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 0 1 0 3 2. 02 00 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | 25 Kegiatan | 939.208.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 955.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6 0 1 0 3 2. 02 00 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | 47 perangkat daerah | 35.201.500,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan | | 34.477.772,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| J U M L A H | | | | | | | | 13.375.753.085,00 | | | | | | | 12.892.653.240,00 | |

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Inspektur,



Drs. Crisna Manurung, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002